

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut *Spillane*, 1987 : 21, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Mudrikah, 2014).

The World Tourism Organization, mendefinisikan aktivitas wisata sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan “keluar dari lingkungan asalnya” untuk lebih dari satu tahun berlibur, berdagang, atau urusan lainnya. Menurut Sari (2014) Wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian penting di berbagai negara dunia. Menurut Ferdian (2015) pariwisata ada hubungannya dengan kegiatan timbale balik antara tempat wisata dengan pengunjung. Menurut Hendrita (2017) Berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Peran pemerintah juga sangat penting dalam pengembangan pariwisata dimana Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata.

Menurut Khotimah & Wilopo (2017) Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Haryanto (2014) mendefinisikan bahwa pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tak dapat dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut (Atika Rahmi, 2016) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 :

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas (Prathama, 2020).

B. Kepariwisataan

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Mudrikah, 2014).

C. Sektor pariwisata

Menurut Caretourism, Sektor pariwisata adalah sekumpulan unit produksi dalam industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa yang khususnya dibutuhkan para pengunjung. Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (*etnik*). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia (Mudrikah, 2014)

D. Daerah Tujuan Wisata Pantai

1. Kawasan wisata

Menurut Nyoman (1987:148), kawasan wisata adalah “sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat; atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu

daerah tujuan wisata”. Kawasan dan daya tarik wisata alam/ODTWA adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan wisata alam adalah : Suatu kawasan yang mempunyai potensi dan menjadi bahan perhatian wisatawan untuk dikembangkan menjadi tempat kunjungan wisatawan seperti zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan wisata dan TAHURA, TWA, SM dan TB. Kawasan Daya Tarik Wisata menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Baginda Syah Ali, 2016).

2. Fasilitas wisata

Fasilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:415) adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas wisata merupakan sarana yang bertujuan untuk melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukannya untuk mendapat pengalaman rekreasi, Marpaung (2002:69). Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Fasilitas yang diberikan kepada wisatawan tidak hanya dalam bentuk berwujud (*tangible*) tetapi juga dalam bentuk jasa pelayanan (*intangible*) yang diberikan oleh para karyawan di obyek wisata. Menurut Bukart dan Medlik (1974:133), fasilitas bukanlah merupakan faktor utama yang dapat menstimulusi kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Akan tetapi ketiadaanya dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Maka dari itu fasilitas wisata sangat dibutuhkan sebagai upaya

dalam melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan di tempat yang mereka kunjungi. Menurut Lawson dan Baud-Bovy dalam bukunya *tourism and recreation handbook of planning and design* (1997:17) membagi fasilitas kedalam 2 jenis yaitu :

- a. Fasilitas dasar untuk semua jenis resort atau kompleks rekreasi dimanapun berada, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara umum seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, bersantai dan juga infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah objek wisata.
- b. Fasilitas khusus sesuai dengan karakteristik yang tersedia yang menunjukkan karakter alamiah sebuah obyek wisata. Obyek wisata pantai, gunung, spa, dan objek wisata dengan tema lainnya memerlukan fasilitas khusus yang berbeda. Lawson dan Boud-Bovy (1997:65) juga membagi fasilitas pendukung wisata ke dalam enam jenis, yaitu :
 - 1) Akomodasi (hotel, motel, *cottage*, apartemen dan lain-lain)
 - 2) Makan dan minuman (restoran, *coffe shop*, *snack bar*, dan lain-lain)
 - 3) Sanitasi
 - 4) Aksesibilitas (jalan akses, setapak, pintu masuk atau gerbang utama dan tempat parkir)
 - 5) Fasilitas aktif yaitu fasilitas yang dijadikan sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan.
 - 6) Fasilitas lainnya seperti kantor administrasi, pos keamanan, pos penjaga dan lain-lain (Baginda Syah Ali, 2016).

3. Standar fasilitas wisata

Standar Fasilitas Wisata Menurut Roger A Lancaster (1983:51) dalam buku standarisasi fasilitas mengemukakan mengenai pengertian standar fasilitas adalah “sebagai jumlah fasilitas rekreasi dengan segala kelengkapannya, yang perlu disediakan bagi kebutuhan masyarakat untuk berbagai macam aktivitas rekreasi”. Lancaster juga menyebutkan beberapa persyaratan yang menjadi dasar panduan dalam pengembangan standar fasilitas wisata, diantaranya :

- a. Standar harus realistis dan mudah di capai : menetapkan standar yang terlalu muluk dengan cara yang sulit dicapai dan teknologi yang belum bisa di terapkan di suatu daerah mengakibatkan standar tersebut hanya akan menjadi bahan yang menghiasi laporan studi namun tidak dapat di impelmentasikan
- b. Standar harus dapat di terima dan berguna bagi pengguna maupun pengambilan keputusan : standar yang baik artinya harus menjadi pegangan bersama baik perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga suatu standar tidak akan menjadi benda mati yang kadang kala menjadi beban pagi pengguna.
- c. Standar harus didasarakkan pada analisa yang sesuai berdasarkan informasi terbaik yang dapat diperoleh : sudah barang tentu ketersediaan informasi bagi analisis penentuan penetapan suatu standar bagi fasilitas wisata yang akan dibangun salah satu syarat yang sulit dikarenakan data dan infomasi yang terbiak kadang kala menjadi beban dalam proses perencanaan.

Standar fasilitas dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan penciptaan pengalaman rekreasi pada beberapa atraksi wisata yang sejenis atau dapat pula di gunakan untuk membangun keseimbangan antara pembangunan yang di prakarsai oleh swasta maupun pemerintah. Oleh karena

tidak ada satupun atraksi wisata yang akan memiliki standar fasilitas yang sama. maka dalam menentukan standar fasilitas suatu objek perlu terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

- a. Tema dasar dari objek wisata ini akan sangat bergantung kepada aktivitas yang akan berkembang di objek ini.
- b. Tingkat perkembangan, apakah objek wisata ini telah berkembang atau belum berpotensi atau tidak. Kondisi ini akan mempengaruhi langkah penentuan arah dalam penetapan standar fasilitas yang dibutuhkan.
- c. Atrakasi dan pola aktivitas, setelah ditentukan tema dasar maka akan teridentifikasi atrakasi dan pola aktivitas apa saja yang dapat dikembangkan di objek wisata tersebut (Baginda Syah Ali, 2016).

4. Kawasan pantai

Pengertian kawasan wisata pantai dapat ditinjau dari kata-kata “kawasan”, “wisata”, dan “pantai” yang dapat diuraikan sbb;

- a. Kawasan berarti daerah

Menurut Christine Ruse, (1991) *A. Piece of land, section of a building, etc. used for a particular activity, with a particular characteristic* – sebidang lahan yang merupakan bagian dari suatu bangunan dan sebagainya yang dipergunakan bagi aktivitas tertentu dengan karakteristik tertentu.

- b. Wisata berarti :

- 1) Piknik
- 2) Bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb), bertamasya.

3) Kegiatan perorangan atau kelompok untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai sifat sementara, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam

4) Dimensi sosial dan budaya, alam dan ilmu pengetahuan.

c. Pantai berarti :

1) Bagian dari danau atau tepian laut yang terkena gerakan ombak Pada bagian atas pantai terdapat endapan dalam bentuk batuan kerikil sampai endapan yang paling halus selalu terdampar oleh ombak. Sementara batu-batu besar merupakan tanda batas bagian atas gerakan ombak, batu-batuan kecil, pasir dan endapan menutupi daratan bagian yang terdekat dengan air.

2) Bagian daratan yang setiap hari digenangi air pasang surut. (Ensiklopedia Indonesia, 1980).

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kawasan wisata pantai berarti suatu kegiatan perorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu daerah daratan yang terkena gerakan ombak dan digenangi oleh air pasang surut serta ditutupi oleh pasir putih yang terbawa oleh ombak yang mempunyai sifat sementara di dalam mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam dan ilmu pengetahuan. Secara historis, wilayah pesisir telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat mengingat berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimiliki pesisir. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berkembang di wilayah ini sehingga membentuk pola penggunaan campuran yang tidak selamanya sesuai antara satu dengan yang lainnya. di sisi lain, wilayah pesisir merupakan sistem

ekologis dengan kemampuan hasil kelautan yang sangat tinggi. Namun demikian ekosistem ini cenderung mendapat tekanan, baik oleh proses alamiah maupun akibat kegiatan eksploitasi yang cenderung “berlebihan”. Untuk menghindari terjadi pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir yang tidak terintegrasi dengan baik, perlu diperhatikan adanya prinsip-prinsip pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir sebagai berikut :

- a. Penataan ruang wilayah pesisir perlu menetapkan batas-batas daerah pengembangan di lautan. Prinsip ini didasarkan pada tiga (3) alasan :
 - 1) Untuk mendorong mekanisme akuntabilitas yang lebih baik
 - 2) Untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan.
 - 3) Untuk menghindari konflik pemanfaatan.
- b. Penetapan batas-batas daerah lautan seharusnya tidak menutup kemungkinan pemanfaatan sumberdaya yang berada dalam batas-batas daerah laut oleh masyarakat yang berasal dari wilayah lain diluar batas daerah laut tersebut.
- c. Perlindungan terhadap habitat yang sensitif dari berbagai aktifitas yang merusak, baik sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam itu sendiri.
- d. Melokalisir pemanfaatan sumber daya kelautan yang intensif pada area/zona tertentu, sehingga kriteria keberlanjutan pemanfaatan dapat dipenuhi.
- e. Pemisahan kegiatan untuk menghindari konflik pemanfaatan.
- f. Pengendalian berbagai kegiatan secara selektif pada lokasi yang berbeda.
- g. Mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu daerah pantai dan pesisir secara sinergi satu dengan yang lainnya, tanpa ada satu pihak yang dirugikan.

- h. Memungkinkan dibuatnya zona.'sanctuary', khususnya untuk daerah laut yang harus dilindungi, terutama bagi ekosistem yang memiliki dampak luas dan penting bagi ekosistem laut lainnya.
- i. Memberi kesempatan pemulihan area yang telah rusak.

Secara umum pengembangan dan penataan ruang pesisir mempunyai tujuan yang spesifik, yang tetap sejalan dengan tujuan penataan ruang seperti yang telah digariskan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang wilayah pesisir adalah :

- a. Menjaga kualitas pantai dan laut.
 - b. Menjaga keanekaragaman spesies (*Biodiversity*) agar tetap lestari.
 - c. Melindungi area-area yang sensitif secara ekologis, misalnya daerah abrasi pantai.
 - d. Mengkonservasi proses ekologis yang penting, misalnya pencegahan kekeruhan yang mengganggu intervensi sinar matahari kelaut.
 - e. Memelihara kualitas air, diantaranya melalui perwujudan konsep keterpaduan pengelolaan sumberdaya air antara hulu dan hilir (*integrated upstream dan downstream water management*)
 - f. Mengkonservasi habitat tertentu terutama bagi ekosistem mangrove dan terumbu karang.
 - g. Memulihkan ekosistem pesisir yang rusak.
5. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata merupakan salah satu dari komponen wisata yang perlu diketahui dan dimengerti secara lebih mendalam, untuk itu di bawah ini akan dijelaskan pengertian daya tarik wisata. Berdasarkan keputusan bersama antara

menteri pertanian dan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi Nomor 204/Kpts/HK050/41989 dan Nomor KM 47/PW.004/MPPT-1989, yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu objek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, lain dari pada yang lain, memiliki sifat yang menimbulkan semangat dan minat wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan diuraikan bahwa yang dimaksud objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Pasal 4 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia, yang berwujud museum, peninggalan sejarah, purbakala, wisata argo, wisata tirta, wisata buru, taman rekreasi dan tempat hiburan (Mahadi & Indrawati, 2010).

Daya tarik wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam dan lingkungan, baik dalam keadaan alami maupun setelah adanya budi daya dari manusia. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang unik, memiliki ciri khas tersendiri yang pelaksanaannya memanfaatkan alam, baik keindahannya iklimnya, maupun bentuk tanahnya sehingga menarik pengunjung untuk melakukan kegiatan tersebut karena jarang ditemui.

Lebih lanjut dikatakan dalam *Tourist and Recreation Handbook of Planning Desain, 1998* oleh *Manuel-Bovy and Fred Lawson* dalam mengembangkan pantai sebagai daya tarik rekreasi tidak hanya terbatas pada pengkajian pantai saja tetapi lebih luas lagi membahas tentang laut dan pesisir bahkan sampai pada perencanaan tata ruang kota itu sendiri, untuk kawasan itu sendiri aspek-Tinjauan yang perlu dikaji adalah : (Mahadi & Indrawati, 2010) .

1. Laut
 - a. Kondisi Iklim yang akan berdampak pada kawasan (temperatur udara, angin, dan cuaca)
 - b. Kualitas air terhadap pencemaran
 - c. Gelombang pasang surut
 - d. Ekologi yang ada di laut dan pantai
 - e. Potensi kegiatan rekreasi
2. Pantai
 - a. Kualitas material pantai (tekstur, warna dan sebagainya)
 - b. Keseimbangan pantai (erosi dan ekresi dan sebagainya)
 - c. Kedalaman dan panjang (luas Kepemilikan and akses publik)
 - d. Pengaruh pantai terhadap material bangunan
3. Belakang pantai
 - a. Daerah Yang diperkenankan (luas dan kondisi yang akan digunakan)
 - b. *View* kelaut dan sekitarnya
 - c. Geomorfologi (bukit, tebing, dataran dan rawa)
 - d. Vegetasi dan iklim kawasan (angin, suhu dan manusianya dan sebagainya)
 - e. Perlindungan terhadap degradasi (konservasi, pembangunan, dan pandangan)

- f. Aksesibilitas (jalan, pengendalian, kondisi serta permasalahannya)
- g. Penataan lingkungan (*drainase*, didalam maupun luar tanah)
- h. Tahapan pengembangan (*zoning* dan lokasi).

E. Pandemi Covid-19

Hampir di seluruh bagian dunia tengah dihadapi pandemi virus Covid-19 tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data (WHO, 2020) virus Corona merupakan virus yang dapat menyerang baik hewan maupun manusia. Virus Corona ini dapat mengakibatkan infeksi pernafasan seperti flu hingga *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) atau *Severe Acute Respiratory* (SARS). Virus jenis baru dari penyebaran virus *corona* ini ialah covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok tahun 2019 lalu pada bulan desember. Dampak dari covid-19 ialah menyebabkan penyakit pernafasan seperti flu dengan gejala batuk, demam dan kasus yang lebih parah ialah kesulitan bernafas hingga dapat menelan korban jiwa. Virus Covid-19 sangat menular dan dapat menyebar antar manusia dengan cepat melalui cairan atau tetesan lewat mulut dan hidung.

Cairan dari orang yang sudah positif akan menempel pada permukaan benda dan dapat bertahan hidup hingga sembilan hari lamanya. Orang lain yang menyentuh permukaan benda yang sudah diinggapi Covid-19 atau bersalaman dengan seseorang yang positif Covid-19 kemungkinan dapat terinfeksi apabila kemudian menyentuh area muka seperti mulut, hitung, atau mata. Sehingga banyak sekali himbauan untuk melakukan *self-quarantines* dan mencuci tangan dengan sabun secara berkala. Apabila memang mengharuskan keluar rumah, dihimbau untuk melakukan social distancing sejauh lebih dari 1 meter. Virus Covid-19 masih terus terjadi hingga saat ini (Maharani & Mahalika, 2020).

F. Pariwisata Normal Baru

Pariwisata Normal Baru diartikan sebagai adaptasi kebiasaan berwisata dengan cara yang diartikan sebagai kenormalan baru selama pandemi Covid-19. Terbatasnya ruang gerak manusia selama pandemi membuat para aktor termasuk pemerintah pusat dan daerah, investor dan pengelola kawasan wisata hingga masyarakat memutar otak untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana cara menyelamatkan sektor pariwisata ditengah pandemi?

Maka dari itu, muncullah inisiatif baru berupa terobosan untuk berwisata aman di tengah pandemi. Pemerintah pusat yang menggaungkan kampanye tagar #DiIndonesiaAja yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia berwisata di dalam negeri saja. Tujuannya adalah agar *cash flow* aliran dana konsumsi masyarakat hanya berputar di dalam negeri. Tentunya hal ini akan berjalan baik, jika diiringi dengan jaminan rasa aman bagi masyarakat yang ingin berwisata di tengah pandemi. Lebih lanjut, di bagian pembahasan penulis akan menjelaskan terkait pariwisata normal baru secara komprehensif beserta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam mendukung pariwisata normal baru sebagai percepatan normalisasi ekonomi Indonesia (Maharani & Mahalika, 2020).

G. Dasar Pengetahuan, Sikap dan Tindakan

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam

membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*). Tingkat pengetahuan di dalam Domain Kognitif, pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan. (Notoatmodjo, 2007)

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari .

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuannya yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas.

2. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Beberapa batasan lain tentang sikap ini dapat dikutipkan sebagai berikut “*An individual’s social attitude is a syndrome of respons consistency with regard to social object*” (Campbell, 1950). “*Attitude*

entails an existing predisposition to response to social object which in interaction with situational and other dispositional variables, guides and direct the overt behavior of the individual” (Cardno, 1955). Dari batasan-batasan di atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Newcomb, salah seorang ahli psikologis sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap itu merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka.

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Dalam bagian lain Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yaitu kepercayaan (keyakinan) akan ide konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*). Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*).

Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yaitu :

a. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespons (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.

c. Menghargai (*valuting*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

3. Praktik atau tindakan (*practice*)

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Praktik ini mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

a. Respons terpimpin (*guided response*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik tingkat pertama.

b. Mekanisme (*mechanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat kedua.

c. Adopsi (*adoption*)

Adopsi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya tanpa mengurangi

kebenaran tindakan tersebut. Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung yakni wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (*recall*). Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan mengobservasi tindakan atau kegiatan responden. Pengukuran praktik (*overt behavior*) juga dapat diukur dari hasil perilaku tersebut.

H. Konsep Perilaku

1. Pengertian perilaku

Menurut Okviana, (2015) perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Menurut Notoatmojo, (2010) perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori „S-O‘R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”. Respon dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Respon respondent atau reflektif

Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.

b. Operan respon

Respon operant atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan.

2. Jenis-jenis perilaku

Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana (2015):

- a. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
- b. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif
- c. Perilaku tampak dan tidak tampak
- d. Perilaku sederhana dan kompleks
- e. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

3. Bentuk-bentuk perilaku

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Bentuk pasif /perilaku tertutup (*covert behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

- b. Perilaku terbuka (*overt behavior*) Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut teori Lawrance Green dan kawan-kawan (Notoatmodjo, 2007) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviorcauses*) dan faktor diluar perilaku (*non behaviour causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

- a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

- 1) Pengetahuan apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam hal ini pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan (Notoatmodjo, 2007).

- 2) Sikap Menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen *cognitive*, *affective* dan *behavior* (dalam Linggasari, 2008). Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut:
- a) Afeksi (*affect*) yang merupakan komponen emosional atau perasaan.
 - b) Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.
 - c) Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu (Winardi, 2004).

Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: menerima (*receiving*), menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Merespon (*responding*), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Menghargai (*valuing*), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Bertanggungjawab (*responsible*), bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi.

- b. Faktor pemungkin (*enabling factor*), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana

keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.

- c. Faktor penguat (*reinforcement factor*), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya (Siti, 2018)